Analisis Basis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang

Edi Mulyanto, Jumino, Tutug Srijatmiko

^{1,2,3}Universitas Pamulang
dosen01755@unpam.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
Ekonomi Regional, Metode Location Quotient	Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dari Basis Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang, sebagai kajian Ekonomi Regional. Penelitian ini menggunakan metode <i>Location Quotient</i> . Metode ini akan membandingkan terhadap Porsi Lapangan Kerja / nilai tambah untuk sektor yang sama ditingkat yang lebih tinggi/nasional. Letak kota geografis Kota Tangerang sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dengan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang adalah salah satu merupakan daerah penyangga Ibu kota Negara DKI Jakarta. Posisi letak Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibu kota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang dan sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif. Penilitan ini akan difokuskan pada analisis Basis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa. Berdasarkan potensi tersebut, maka strategi peningkatan daya saing daerah antara lain, pertama adalah strategi berbasis keunggulan kompetitif daerah dilakukan dengan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa), strategi kedua dengan strategi berbasis komoditi unggulan melalui gerakan <i>One village one product</i> (OVOP), strategi ketiga dengan strategi pembangunan tidak seimbang yang dilakukan dengan pembangunan industri berbasis pertanian (agroindustri).

Pendahuluan

Ruang mempengaruhi cara kerja sistem ekonomi. Ruang atau regional adalah sumber keuntungan (atau kerugian) ekonomi, serta penyumbang faktor produksi tinggi (atau rendah). Sisi regional atau wilayah juga menghasilkan keuntungan geografis, seperti aksesibilitas yang mudah (atau sulit) dari suatu daerah dan sumber bahan baku yang tinggi (atau rendah). Wilayah juga menjadi sumbernya keuntungan dan munculnya akumulasi proses produktif: secara detailnya, kedekatan wilayah bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang mengurangi biaya produksi (Capello, 2015:1) Sumber daya produktif didistribusikan secara tidak merata dalam suatu ruang atau wilayah: Sumber daya tersebut sering terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja

baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pemerintah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah”, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing–masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah.

Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaan, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat.

Kota Tangerang selama beberapa tahun terakhir ini terus mendorong berbagai sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menjadi bagian dari sebuah Penyangga Perekonomian Ibu Kota yang letaknya strategis dan suatu kawasan dinamis memiliki banyak potensi, namun terus memacu tumbuhnya industri manufaktur yang memberi nilai tambah lebih besar. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, yang di dalamnya adalah Warga atau Penduduk Kota Tangerang khususnya. Begitupula nilai rupiahnya yang dibelanjakan untuk berbagai kegiatan, seperti membeli barang dan jasa, juga bertambah besar.

Majunya perekonomian suatu daerah diukur menggunakan pertumbuhannya atau perkembangan jumlah PDRB, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap periodenya. Diperlukan pengembangan sektor unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun semakin tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menimbulkan masalah lain berupa ketidakmerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau daerah disebabkan karena adanya perbedaan potensi sumber daya manusia, infrastruktur dan potensi sumber daya alamnya.

Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi. Pada penelitian kali ini Peneliti memfokuskan pada Kota Tangerang bagaimana dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan ekonomi regional perlu adanya keseimbangan dan keserasian yang ideal antara berbagai sektor yang ada, harus terus berpacu dan meningkatkan serta memilih potensi produk unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah maka daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing . Adapun kewenangan tersebut mencakup beberapa hal yaitu : perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah dan juga pemanfaatan secara maksimal terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah. Akan tetapi pelimpahan wewenang tersebut akan memiliki konsekuensi yang berisikan tanggung jawab lebih besar, yaitu bahwa daerah menjadi penanggung jawab utama terhadap maju dan mundurnya suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang pada tahun 2022 mencapai Rp112.7 Triliun Rupiah dengan 4 (empat) kontribusi terbesar yaitu : Industri Pengolahan 35%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13%, Transportasi dan Pergudangan 12,6% serta Informasi dan Komunikasi 10.%. (BPS 2022). Dengan demikian daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang

tepat guna untuk pemanfaatan potensi daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar pertumbuhan yang serasi, selaras dan berkesinambungan.

Artikel ini akan mengkaji bagaimana metode *Location Quotient* dapat membantu dalam penganalisan yang berkaitan dengan klasifikasi sektor-sektor kegiatan ekonomi dan mengulas bagaimana peran metode *Location Quotient* dapat diterapkan dalam mengatasi dan mengembangkan Ekonomi Regional Kota Tangerang.

Metode

Metode penelitian untuk menganalisis sektor potensial perekonomian Kota Tangerang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah persiapan penelitian yang meliputi mencari literatur dan referensi yang dapat dipercaya, serta data pendukung dari berbagai sumber seperti Tinjauan Pustaka dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tahap kedua adalah analisis kuantitatif menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah sektor di wilayah Kota Tangerang dengan tingkat nasional. Jika $LQ > 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai basis potensial, sedangkan jika $LQ < 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai non basis.

Metode LQ memiliki beberapa kritik, seperti asumsi bahwa produktivitas atau konsumsi rata-rata antar wilayah adalah sama. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah produk yang dihasilkan untuk kebutuhan lokal atau diekspor. Oleh karena itu, perlu dilakukan teknik minimum *requirement* untuk menghindari *double counting* dan memperoleh ranking sektor yang relevan.

Tahap ketiga adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang menjadi referensi dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan potensi ekonomi unggulan di Kota Tangerang. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dengan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional, mengingat Kota Tangerang merupakan wilayah penyangga ekonomi Ibu kota Negara Republik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Ilmu Ekonomi Regional adalah cabang baru dalam ilmu ekonomi yang berkembang, terkait dengan analisis potensi ekonomi wilayah. Perencana wilayah perlu mampu menganalisis sektor-sektor yang perlu dikembangkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah. Setelah Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan lebih dalam menetapkan sektor yang diprioritaskan.

Pentingnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk melihat sektor-sektor dengan keunggulan komparatif menjadi semakin penting. Keunggulan tersebut bisa terkait dengan kondisi alam, penguasaan teknologi mutakhir, ketrampilan khusus masyarakat, kedekatan dengan pasar, aksesibilitas yang tinggi, konsentrasi kegiatan sejenis, aglomerasi, upah buruh rendah, mentalitas masyarakat yang mendukung, dan kebijakan pemerintah.

Ilmu Ekonomi Regional membahas pertanyaan mengenai di mana dan mengapa suatu kegiatan sebaiknya dilakukan di wilayah tertentu. Dalam menentukan lokasi, ilmu ekonomi regional memberikan arahan sampai batas wilayah yang dipilih, namun untuk menentukan tempat kegiatan secara spesifik memerlukan bantuan dari ilmu lain, seperti ilmu kesesuaian lahan.

Sektor unggulan adalah sektor yang berperan besar dalam perkembangan perekonomian wilayah. Kriteria sektor unggulan meliputi pertumbuhan ekonomi tinggi, penyerapan tenaga kerja besar, keterkaitan antar sektor, dan penciptaan nilai tambah tinggi. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan dengan posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Penetapan komoditas unggulan didasarkan pada pertimbangan teknis dan sosial ekonomi. Pemerintah perlu membuat program kebijakan yang sesuai dengan keadaan daerah dan memperhatikan sektor unggulan dalam perencanaan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Metode atau cara mencapai tujuan yang ditetapkan meliputi diagram alir penelitian yang menggambarkan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan, serta jadwal

penelitian yang diusulkan. Diagram alir harus menyertakan penahapan yang jelas, indikator capaian yang ditargetkan, dan tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

PDRB Kota Tangerang Dan PDRB Provinsi Banten

Penelitian ini bersumber berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melihat secara rinci masing-masing untuk PDRB Kota Tangerang Dan PDRB Provinsi Banten sebagai dasar analisis yang mendukung penelitian seperti pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1			
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Banten (Juta Rupiah)			
Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 38.998,270	Rp 40.199,750	Rp 44.050,680
B, Pertambangan dan Penggalian	Rp 4.269,640	Rp 4.658,860	Rp 4.142,440
C, Industri Pengolahan	Rp 195.331,620	Rp 209.815,060	Rp 227.675,910
D, Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 10.504,200	Rp 12.140,420	Rp 13.016,300
E, Pengadaan Air	Rp 550,950	Rp 585,160	Rp 612,680
F, Konstruksi	Rp 71.551,760	Rp 82.113,950	Rp 91.202,800
G, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 83.240,610	Rp 85.898,990	Rp 93.547,290
H, Transportasi dan Pergudangan	Rp 40.458,220	Rp 41.693,880	Rp 71.165,360
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 15.154,340	Rp 15.890,830	Rp 17.447,460
J, Informasi dan Komunikasi	Rp 25.200,740	Rp 26.574,750	Rp 28.218,240
K, Jasa Keuangan	Rp 20.300,420	Rp 22.323,340	Rp 25.307,290
L, Real Estate	Rp 54.258,200	Rp 56.397,210	Rp 60.289,400
M,N, Jasa Perusahaan	Rp 7.325,210	Rp 7.329,420	Rp 7.914,750
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 14.210,480	Rp 14.457,870	Rp 15.227,220
P, Jasa Pendidikan	Rp 24.495,930	Rp 24.346,200	Rp 24.581,060
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 9.183,120	Rp 10.298,330	Rp 10.687,980
R,S,T,U, Jasa lainnya	Rp 10.861,690	Rp 11.163,470	Rp 12.163,450
PDRB	Rp 625.895,380	Rp 665.887,470	Rp 747.250,290
Sumber : BPS Provinsi Banten			

Klasifikasi Lapangan Usaha	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 1.744.674	Rp 1.745.997	Rp 1.811.678
B, Pertambangan dan Penggalian	Rp -	Rp -	Rp -
C, Industri Pengolahan	Rp 37.527.629	Rp 39.039.925	Rp 39.045.450
D, Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 181.389	Rp 193.230	Rp 203.837
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp 99.851	Rp 111.424	Rp 115.947
F, Konstruksi	Rp 8.184.618	Rp 8.917.960	Rp 9.152.502
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 14.503.429	Rp 14.834.200	Rp 15.143.402
H, Transportasi dan Pergudangan	Rp 9.056.918	Rp 9.171.872	Rp 14.157.561
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 1.651.821	Rp 1.708.366	Rp 1.768.467
J, Informasi dan Komunikasi	Rp 10.141.681	Rp 10.717.728	Rp 11.045.691
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 3.286.161	Rp 3.509.708	Rp 3.566.266
L, Real Estate	Rp 8.178.787	Rp 8.508.392	Rp 8.733.864
M, N, Jasa Perusahaan	Rp 1.189.596	Rp 1.174.607	Rp 1.186.470
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 1.247.957	Rp 1.246.584	Rp 1.252.069
P, Jasa Pendidikan	Rp 2.670.786	Rp 2.642.743	Rp 2.644.064
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 1.226.013	Rp 1.344.200	Rp 1.356.029
R,S,T,U, Jasa Lainnya	Rp 1.524.367	Rp 1.546.775	Rp 1.596.736
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	Rp 102.415.675	Rp 106.413.711	Rp 112.780.034
Sumber : BPS Kota Tangerang			

Analisis LQ PDRB Kota Tangerang

Berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh masing-masing untuk PDRB Kota Tangerang dan PDRB Provinsi Banten (seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2) di atas, peneliti telah melakukan analisis yang diperlukan dalam penelitian ini dengan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Klasifikasi Lapangan Usaha	2020	2021	2022	Rata-rata	(+/-)	Basis/Non Basis
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,66	3,68	3,67	3,67	+	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,40	0,43	0,35	0,39	-	Non Basis
C. Industri Pengolahan	0,85	0,86	0,88	0,86	-	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,48	10,04	9,64	9,72	+	Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,90	0,84	0,80	0,85	-	Non Basis
F. Konstruksi	1,43	1,47	1,50	1,47	+	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,94	0,93	0,93	0,93	-	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,73	0,76	0,74	-	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,49	1,49	1,49	+	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,41	0,40	0,39	0,40	-	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,02	1,07	1,03	+	Basis
L. Real Estate	1,09	1,06	1,04	1,06	+	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	1,01	1,00	1,01	1,00	+	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,86	1,85	1,84	1,85	+	Basis
P. Jasa Pendidikan	1,50	1,47	1,40	1,46	+	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,22	1,19	1,21	+	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,17	1,15	1,15	1,16	+	Basis
Sumber : Data Diolah Peneliti						

Berdasarkan data BPS Kota Tangerang (Tabel 2) dan Provinsi Banten (Tabel 1), kemudian dilakukan analisis LQ (*Location Quotien*) menunjukkan hasil seperti terlihat pada Tabel 3 di atas.

Dari Tabel 3 tersebut di atas, diketahui bahwa yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis maupun non basis di Kota Tangerang. Model analisis ini dihitung dengan membandingkan seberapa besarnya peranan salah satu sektor pada suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap besarnya peran sektor tersebut pada tingkat provinsi. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi berapa potensi internal (sektor basis) yang dimiliki oleh Kota Tangerang dan sektor non basis. Apabila indeks $LQ > 1$, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut menjadi sektor basis. Dan $LQ = 1$, sektor tersebut dapat dikatakan hanya mampu untuk memenuhi permintaannya di wilayahnya sendiri, sedangkan apabila $LQ < 1$, sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non basis.

Berdasarkan dari hasil analisis LQ (Tabel 3), diketahui hasil rata-rata nilai LQ pada sektor basis dan non basis di wilayah Kota Tangerang tahun 2020-2022.

Di mana pada hasil perhitungan LQ sektor di bawah ini memiliki hasil $LQ > 1$. Artinya yang menjadi sektor basis (sektor potensial) di wilayah Kota Tangerang sebagai berikut :

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- D. Pengadaan Listrik dan Gas
- F. Konstruksi
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi
- L. Real Estate
- M,N. Jasa Perusahaan
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P. Jasa Pendidikan
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R,S,T,U. Jasa lainnya

Sedangkan pada sektor yang memiliki hasil $LQ < 1$, merupakan sektor non basis yaitu sektor :

- B. Pertambangan dan Penggalian
- C. Industri Pengolahan
- E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H. Transportasi dan Pergudangan
- J. Informasi dan Komunikasi

Kesimpulan

Dari hasil analisis LQ, diketahui bahwa di Kota Tangerang terdapat beberapa sektor basis (sektor potensial), yaitu pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi. Ke 4 (empat) sektor basis tersebut menjadi sektor dominan untuk terus dapat dipertahankan dan dikembangkan di Kota Tangerang. Dengan demikian diharapkan Kota Tangerang dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional.

Pemerintah Kota Tangerang disarankan perlu memberikan perhatian dan dukungan fasilitas sarana prasarana bisnis serta kemudahan akses birokrasi terhadap beberapa sektor non basis, agar sektor non basis di Tangerang dapat tumbuh berkembang yang pada akhirnya diharapkan dapat menyerap Sumber Daya Manusia (tenaga kerja) di wilayah Kota Tangerang dan dapat berkontribusi pula meningkatkan pendapatan daerah Kota Tangerang.

Daftar Pustaka

- A RRT Hidayat, A.Y Asmara, 2017 *Creative Industri in Supporting Economy Growth in Indonesia , Perspective of Regional Innovation System, I O P Conf. Earth and Environment science, Vol 70, 2017., Jakarta.*
- BPS, 2022 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten menurut Lapangan Usaha 2020 – 2022 , Badan Pusat Statistik , Banten.
- BPS, 2022 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang menurut Lapangan Usaha 2020 – 2022, Badan Pusat Statistik , Kota Tangerang
- Bogdja Muljarijadi, 2011 *Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input Output*, Penerbit Unpad Press, Bandung.
- Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Theories regarding the role of the growth poles in the economic integration. *Procedia Economics and Finance*, 8, 262-267
- Ibrahim, 1 (2018) Analisis Potensi Sektor Ekonomi dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi . *Jurnal Ekonomi 1 (1-2)*
- Jhingan, M.L (2016) *Ekonomi Pmbangunan dan Perencanaan*, Jakarta . PT.Raja Grafindo.
- Junaidi A, (2013) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia *Jurnal Kajian Ekonomi Volume 1 No. 1*
- Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Th 2015 – Ekonomi Pembangunan - FIB Universitas Sam Ratulangi Manado .*
- Sujarweni, W (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta Pustaka Baru Press.